

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Audit Internal**

###### **2.1.1.1 Definisi Audit Internal**

Menurut konsorsium organisasi profesi audit internal (2004:9) mengemukakan bahwa :

“audit internal merupakan kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance”

*Institute of Internal Auditing* (IIA) dalam Ardeno Kurniawan (2012:7)

menyatakan bahwa :

“audit internal adalah aktifitas penjaminan yang independen dan objektif serta jasa konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal akan membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan terjadwal untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan pengendalian”

Hal yang sama dikemukakan Hiro Tugiman (2006:11) internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam

suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

### **2.1.1.2 Perkembangan Auditor Internal**

Seperti diungkapkan Sawyers, profesi internal auditing baru berkembang pada tahun 1941 dengan berdirinya the institute of internal auditors. Di indonesia organisasi dan pendidikan internal auditing baru muncul antara tahun 1980-an, dengan dibentuknya forum komunikasi satuan pengawas intern (FKSPI) BUMN/BUMD di selabintana, sukabumi pada tanggal 12 desember 1985, sementara yayasan pendidikan internal audit baru berdiri di jakarta pada tanggal 17 april 1995. FKSPI BUMN/BUMD ini, meskipun belum termasuk auditor internal badan usaha milik swasta, kami harapkan sebagai perintis berdirinya organisasi profesi internal auditing di indonesia dan tidak berlebihan kalau dinamakan perhimpunan auditor internal indonesia (PAII)

Lahirnya unit audit internal, khususnya SPI BUMN/BUMD, tidak terlepas dari peran BPKP, audit internal di lingkungan BUMN/BUMD dipercepat dengan keluarnya peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 1983. Peranan BPKP dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan dan pembinaan di bidang pengawasan, khususnya internal auditing, di indonesia cukup dominan. Disamping memberikan pembinaan dan pendidikan bidang internal auditing, tanggal 24 desember 1985 BPKP mengeluarkan norma pemeriksaan satuan pengawasan intern BUMN/BUMD. Norma ini meliputi norma umum, norma pelaksanaan, norma pelaporan, dan norma tindak lanjut. ( Hiro, 2006:7)

Kebangkitan internal auditor di Indonesia, khususnya auditor BUMN/D, terjadi pada saat pemerintah mengeluarkan PP No.3 TAHUN 1983 YANG MEWAJIBKAN semua BUMN/D untuk membentuk auditor internal pada perusahaan masing-masing. Auditor internal di BUMN/D yang disebut sebagai satuan pengawasan intern (SPI) berkembang maju dan semakin profesional terutama setelah mereka berhimpun dalam satu wadah yang bernama forum komunikasi pengawas intern (FKSPI)

BPKP dan FKSPI kemudian membentuk suatu lembaga, yang diberi nama yayasan pendidikan internal audit (YPIA), untuk mengembangkan lebih lanjut kompetensi dan profesionalisme internal auditor di Indonesia, utamanya SPI BUMN/D. Tujuan utama pembentukan YPIA adalah untuk membina dan meningkatkan kualitas auditor internal sampai ke tingkat standar internasional. Sertifikasi pelatihan audit internal yang bermuara pada sertifikat QIA dan pendidikan profesi berkelanjutan (PPL) merupakan wujud nyata dari upaya peningkatan profesionalisme auditor internal Indonesia. (YPIA, 2008:5).

### **2.1.1.3 Standar Profesi Auditor Internal**

Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi dan memiliki standar praktik pelaksanaan pekerjaan yang handal. Sehubungan dengan hal tersebut,

konsorium organisasi profesi auditor internal dengan ini menerbitkan standar profesi auditor internal (SPAI)

Standar profesi auditor internal ini merupakan awal dari serangkaian pedoman praktek audit internal (PPAI), yang diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi internal auditor yang ingin menjalankan fungsinya secara profesional. Keseluruhan pedoman praktik audit internal terdiri atas:

1. Definisi audit internal
2. Kode etik profesi audit internal
3. Standar profesi audit internal
4. Berbagai saran penerapan

Definisi, kode etik dan standar merupakan pedoman utama yang penting bagi pelaksanaan praktik audit yang profesional dan sifatnya wajib untuk dipatuhi. SPAI terdiri atas standar atribut, standar kinerja, dan standar implementasi. Standar atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak pihak yang melakukan audit internal. standar kinerja menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal. Dan standar impementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. (konsorsium, 2004:5)

#### **2.1.1.4 Tanggung Jawab dan Kewenangan Audit**

YPIA (2008:9) mengemukakan bahwa tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam *Charter Audit Internal*, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.

Menurut Sawyer *et. al.*, yang diterjemahkan oleh Ali A. (2006:83) auditor internal sangat bisa membantu manajemen dengan mengevaluasi sistem pengendalian dan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern. Tetapi harus diingat bahwa auditor internal membantu manajemen, bukan berperan sebagai manajer itu sendiri.

Sawyer *et. al.*, yang diterjemahkan oleh Ali A. (2006:207) juga mengungkapkan bahwa auditor internal harus bertanggung jawab untuk merencanakan penugasan audit. Perencanaan harus didokumentasikan dan harus mencakup:

- 1) Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan.
- 2) Perolehan latar belakang informasi tentang aktivitas yang akan diaudit.
- 3) Penentuan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit.
- 4) Komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang akan dilakukan.
- 5) Pelaksanaan, jika layak, survei lapangan untuk mengenal lebih dekat aktivitas dan kontrol yang akan diaudit, untuk mengidentifikasi hal-hal yang akan ditekankan dalam audit, dan untuk mengundang komentar dan saran dari klien.
- 6) Penulisan program audit.
- 7) Penentuan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil audit akan dikomunikasikan.
- 8) Perolehan pengesahan rencana kerja audit.

#### **2.1.1.5 Ruang Lingkup Audit**

Ruang lingkup pekerjaan menurut Hiro Tugiman, (2006:41) adalah Ruang lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab.

Sedangkan menurut standar 2100, YPIA (2008:13) lingkup penugasan audit internal adalah fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan

kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan *governance* dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

### 2.1.1.6 Tujuan Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) tujuan pemeriksaan internal adalah

“membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar”

Menurut Hery (2013:73 ), keseluruhan tujuan pemeriksaan internal adalah untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggungjawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan/hal hal yang diperiksa. Untuk mencapai keseluruhan tujuan ini, maka auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut :

- 1) Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya
- 2) Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
- 4) Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan
- 5) Menilai prestasi kerja para pejabat/ pelaksana dalam menyelesaikan tanggungjawab yang telah ditugaskan.

Tujuan utama pemeriksaan intern adalah untuk meyakinkan :

1. Keandalan informasi
2. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan peraturan perundang-undangan

3. Perlindungan terhadap harta
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien
5. Pencapaian tujuan

#### **2.1.1.6 Kode Etik Profesi Audit Internal**

Seperti yang telah ditetapkan oleh konsorsium organisasi profesi auditor internal (2004:11). Isi dari kode etik profesi audit internal ini adalah sebagai berikut:

1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya
2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau pihak yang dilayani. namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
4. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif
5. Auditor internal tidak boleh menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesional yang dimilikinya
6. Auditor internal hanya melakukan jasa jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya
7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standar profesi audit internal.
8. Auditor internal harus bersikap hati hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) secara melanggar

hukum, atau (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.

9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta fakta yang tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan yang di reviu atau (ii) menutupi adanya praktik praktik yang melanggar hukum
10. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas, serta kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan

## **2.1.2 Pengendalian Internal**

### **2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Internal**

Menurut mulyadi (2001:163) sistem pengendalian internal adalah

“sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”

Menurut The committee of sponsoring organizations (COSO) yang dikutip dalam YPIA (2008:17) merumuskan pengendalian internal sebagai :

“sebuah proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberi jaminan yang wajar atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan yang dimaksud, secara umum meliputi, operasi yang efisien dan efektif, pelaporan yang handal, dan ketaatan pelaksanaan kegiatan organisasi terhadap semua kebijakan dan regulasi yang berlaku”

Pengertian pengendalian internal menurut Hery (2013:90), yaitu:

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”.



Menurut YPIA (2008:3) pengendalian internal adalah segala hal untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian internal dapat berupa kebijakan, prosedur, alat-alat, dan tindakan untuk memastikan bahwa hal yang kita inginkan terjadi akan terjadi dan hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi.

Dari pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, dijelaskan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditunjukkan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

#### **2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal**

Ada hubungan langsung antara tujuan entitas dan pengendalian internal yang diimplementasikannya untuk mencapai tujuan entitas. Sekali tujuan entitas ditetapkan, manajemen dapat menentukan potensi risiko yang dapat menghambat tujuan tadi. Dengan informasi ini, manajemen dapat menyusun jawaban yang tepat, termasuk merancang pengendalian internal.

Menurut James (2009:389) Tujuan pengendalian internal adalah Menyediakan keyakinan yang memadai bahwa, aset telah dilindungi, dan digunakan untuk keperluan bisnis, informasi bisnis akurat, dan karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku

Menurut Arens (2013:370) tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian yaitu reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efektivitas operasi, ketaatan pada hukum dan peraturan

Tuanakotta (2010:127) menyatakan bahwa tujuan pengendalian secara garis besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok, sebagai berikut:

1. Startegis, sasaran utama (*high-level goals*) yang mendukung misi entitas.
2. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan).
3. Operasi (pengendalian operasional atau *operational controls*).
4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) yang diterjemahkan oleh Yayasan Pendidikan Intern Audit (YPIA) (2008:8), untuk mencapai keseluruhan tujuan organisasi, ada dua tujuan pengendalian yang harus dicapai.

Masing-masing tujuan pengendalian mempunyai lagi dua turunan, yaitu:

- 1) Tujuan pengendalian akuntansi
  - a) Mengamankan harta kekayaan organisasi
  - b) Menjaga dapat dipercayanya catatan dan laporan
- 2) Tujuan pengendalian operasi atau administrasi
  - a) Mendorong efisiensi dan kehematan
  - b) Mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku

Menurut *The Institute of Internal Auditors* (IIA) menambahkan satu tujuan yang telah dirumuskan oleh AICPA menjadi sebagai berikut:

- 1) Dapat dipercaya dan integritas informasi
- 2) Ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, UU dan peraturan
- 3) Pengamanan aktiva
- 4) Ekonomis dan efisiensi pengelolaan sumber daya
- 5) Efektifitas pencapaian tujuan

Tujuan pengendalian intern seperti yang tercantum dalam definisi yang dibuat oleh COSO adalah:

- 1) Efektivitas dan efisiensi operasi
- 2) Keandalan pelaporan keuangan
- 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

COSO menganggap tujuan “keamanan harta” termasuk dalam tujuan “efektivitas dan efisiensi operasi.”

Perbandingan tujuan pengendalian intern menurut ketiga standar tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan tujuan pengendalian intern**

AICPA	IIA	COSO
Keandalan catatan dan laporan	Keandalan dan integritas informasi	Keandalan laporan dan informasi
Kepatuhan ada UU dan peraturan yang berlaku	Kepatuhan pada rencana, kebijakan, prosedur, UU dan peraturan	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
Keamanan aset	Keamanan aset	Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional
Efisiensi dan kehematan kegiatan operasional	Efisiensi dan kehematan kegiatan operasional	
	Efektivitas pencapaian tujuan	

*Sumber :Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPAI) (2008:10)*

### 2.1.2.3 Komponen Pengendalian Internal

Pengendalian internal mencakup lima komponen dasar kebijakan prosedur yang dirancang manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu perusahaan dapat dipenuhi. Struktur pengendalian internal bukan suatu proses yang berurutan di mana satu komponen hanya mempengaruhi satu

komponen berikutnya, melainkan hampir semua komponen dapat dan akan mempengaruhi unsur yang lainnya.

Komponen pengendalian internal menurut *Committe of Sponsoring Organizations (COSO)* di antaranya meliputi lima komponen, yaitu:

1. *Control Environment*
2. *Risk Assesment*
3. *Control Activities*
4. *Information and Communication*
5. *Monitoring*

Komponen pengendalian internal menurut *Committe of Sponsoring Organizations (COSO)* yang dikutip oleh Arens (2013:376), yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi Akuntansi
5. Pemantauan

Adapun penjelasan dari komponen pengendalian internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas tersebut. Subkomponen dari lingkungan pengendalian internal, yaitu:
  - a. Integritas dan Nilai-nilai Etis
  - b. Komitmen pada Kompetensi
  - c. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit
  - d. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen
  - e. Struktur Organisasi
  - f. Kebijakan Perihal Sumber Daya Manusia

## 2. Penilaian Risiko

Merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

## 3. Aktivitas Pengendalian

adalah kebijakan dan prosedur untuk membantu, selain yang sudah termasuk empat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas.

Kebijakan dan prosedur ini terdiri atas:

- a. Pemisahan Tugas
- b. Otorisasi yang Tepat atas Transaksi
- c. Dokumen dan Catatan yang Memadai
- d. Pengendalian Fisik atas Aktiva dan Catatan
- e. Pemeriksaan Independen atau Verifikasi Internal

## 4. Informasi dan Komunikasi Akuntansi

Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktiva. Sistem informasi dan komunikasi mempunyai beberapa subkomponen, yang biasanya terdiri atas kelas-kelas transaksi seperti penjualan retur penjualan, penerimaan kas, akuisisi, dan sebagainya

## 5. Pemantauan

Aktifitas pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan, dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

### 2.1.2.4 Jenis Pengendalian Internal

Menurut Karyono (2013:50) pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam lima bagian, sebagai berikut:

1. Pengendalian Preventif (*Preventive Controls*)
2. Pengendalian Detektif (*Detective Controls*)
3. Pengendalian Korektif (*Corrective Controls*)
4. Pengendalian Langsung (*Directive Controls*)
5. Pengendalian Kompensatif (*Compensative Controls*)

Berdasarkan klasifikasi pengendalian internal tersebut, pengendalian yang dirancang secara sistematis dapat mencegah adanya kekeliruan dan ketidakberesan.

### 2.1.3 Profesionalisme Auditor Internal

Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Secara umum profesional auditor internal mengakui tanggung jawabnya terhadap perusahaan (Asikin, 2006). Profesionalisme adalah sifatsifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada

atau dilakukan oleh seorang professional. Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi *Standards Professional Practice Internal Auditing* yang telah ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors dalam Effendi (2006), antara lain:

- a. Standar atribut, yang meliputi: otoritas, dan tanggung jawab, independensi dan objektivitas, kemahiran profesional dan perhatian profesional yang harus diberikan, dan program perbaikan dan penjaminan kualitas.
- b. Standar kinerja, yang meliputi: mengatur aktivitas internal auditor, sifat pekerjaan, keterlibatan perencanaan, melakukan keterlibatan, komunikasi hasil, pemantauan kemajuan dan penerimaan manajemen risiko.

Menurut Hiro (2006:20) standar profesional audit internal meliputi independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan manajemen bagian audit internal.

Lebih lanjut standar profesional audit internal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Independensi

Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Para Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan/penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya.. Hal ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para auditor internal.

#### 2. Kemampuan profesional

pemeriksaan internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

3. Lingkup pekerjaan  
Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab. Tujuan utama pengendalian internal adalah untuk meyakinkan keandalan informasi, kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana prosedur dan ketentuan perundang undangan, perlindungan terhadap aktiva organisasi , penggunaan sumberdaya secara ekonomis dan efisiensi tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan  
Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan, yang harus disetujui dan ditinjau atau direview oleh pengawas.
5. Manajemen bagian audit internal  
Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat, sehingga pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan, sumberdaya bagian audit internal dipergunakan secara efisien dan efektif, dan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi.

## **2.1.4 *Fraud***

### **2.1.4.1 Definisi *Fraud***

Faktor utama tindak kecurangan adalah “manusia” dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan tercela (valery, 2013:135)

Pengertian *fraud* menurut Karyono (2013:1), yaitu: “*fraud* adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya”.

*Association of Certified Fraud Examiner* (dalam Karyono, 2013) mengemukakan bahwa:



*'Fraud is an intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of person it included any mean, such cheats another. (Fraud berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur surprise/tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain)'*.

Definisi lain dari *fraud* menurut *The Institute of Internal Auditor* (dalam Karyono, 2013), yaitu:

*'Fraud is an array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception. (Kecurangan adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja)'*.

Menurut Amin Wijaja Tunggal (2015:18) , suatu kecurangan terdiri atas tujuh unsur yang penting, apabila tidak terdapat dari salah satu dari ketujuh unsur tersebut, maka tidak ada kecurangan yang dilakukan. Unsur unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. harus terdapat penyajian yang keliru ( mispresentation)
2. dari suatu masa lampau (past) atau sekarang(present)
3. faktanya material (material fact)
4. dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan ( make knowingly or recklessly)
5. dengan maksud (intent) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi
6. pihak yang terluka harus beraksi terhadap kekeliruan penyajian
7. mengakibatkan kerugian

Menurut amin Widjaja Tunggal (2015:42) terdapat tanda yang bervariasi yang menunjukkan bahwa kecurangan mungkin terjadi dalam suatu perusahaan.

Beberapa gejala peringatan adalah sebagai berikut :

1. Laba yang dilaporkan tidak meningkat sesuai dengan harapan
2. Penyimpangan (variances) dalam barang jadi, bahan baku atau suplai

3. Peningkatan jumlah biaya operasi yang tidak dapat dijelaskan
4. Peningkatan yang tidak dapat dijelaskan dalam biaya bahan suplai atau upah
5. Laporan tanpa nama dari transaksi yang diragukan/ dipertanyakan

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, *fraud* dapat juga diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

#### **2.1.4.2 Faktor Penyebab/Pendorong *Fraud***

Valery g kumaat (2013:139) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya fraud sebagai berikut :

1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan celah risiko
2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman yang berlaku
3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap *implementasi business process*,
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap business process yang berlaku

Cressy (dalam Karyono, 2013) mengemukakan bahwa terdapat 3 pemicu utama yang dikenal dengan "*Fraud Triangle Theory*" sehingga seseorang terdorong untuk melakukan *fraud*, yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*)
2. Kesempatan (*Opportunity*)
3. Pembenaran (*Rationalization*)

Adapun penjelasan dari *Fraud Triangle Theory* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tekanan

Dorongan untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja.

2. Kesempatan

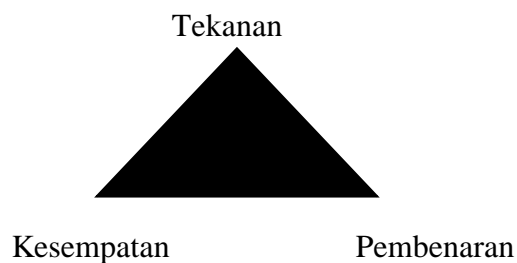
Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.

3. Pembenaan

Pelaku kecurangan mencari pembenaan antara lain:

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.
- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
- c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

Seperti kebanyakan terjadi di Indonesia, pelaku *fraud* akan mencari berbagai alasan bahwa tindakan yang dilakukannya bukan merupakan *fraud*, karena pelaku merasa bahwa *fraud* yang dilakukannya juga dilakukan oleh sebagian masyarakat lainnya yang punya kesempatan.



Sumber: Karyono (2013:9)

**Gambar 2.1 *Fraud Triangle Theory***

### 2.1.4.3 Klasifikasi *Fraud*

Karyono (2013:11) mengemukakan klasifikasi *fraud* sebagai berikut:

1. Kecurangan ditinjau dari Sudut/Sisi Korban Kecurangan
  - a. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi entitas organisasi
  - b. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain
2. Kecurangan ditinjau dari Sisi Pelaku Kecurangan
  - a. Kecurangan Manajemen (*Management Fraud*)
  - b. Kecurangan Karyawan (*Non-management Fraud*)
  - c. Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi (*Ekstern*)
3. Kecurangan ditinjau dari Akibat Hukum yang ditimbulkannya  
Perbuatan curang merupakan tindakan melawan hukum atau suatu tindakan kriminal. Perbuatan curang tersebut dapat diklasifikasikan menurut akibat hukum yang ditimbulkan yaitu: kasus pidana umum, pidana khusus, dan kasus perdata.

### 2.1.4.4 Bentuk Bentuk Fraud

Menurut examination manual 2006 dari *association of certified fraud examiner* yang dikutip dari karyono (2013:17), fraud (kecurangan) terdiri atas empat kelompok besar yaitu :

1. kecurangan laporan (*fraudulent statement*) yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*financial statement*) dan kecurangan laporan lain (*non financial statement*)
2. penyalahgunaan aset (*aset misappropriation*) yang terdiri atas kecurangan kas (*cash*) dan kecurangan persediaan dan aset lainnya (*inventory and other asets*)
3. korupsi (*corruption*) terdiri atas pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), hadiah tidak sah (*illegal gratuities*), dan pemerasan ekonomi (*economic exortion*)
4. kecurangan yang berkaitan dengan komputer

## 2.1.5 Persediaan

### 2.1.5.1 Definisi Persediaan

Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin (Eddy, 2008:235)

Menurut kieso (2011:402) persediaan (*inventory*) adalah pos pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual

Menurut ikatan akuntansi indonesia yang dikutip Sigit Hermawan dalam buku akuntansi manufaktur (2013:56) persediaan adalah aktiva (1) yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, (2) dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau (3) dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Menurut Stice (2009:571), menyatakan persediaan adalah istilah yang diberikan untuk aktiva yang akan dijual dalam kegiatan normal perusahaan atau aktiva yang dimasukkan secara langsung atau tidak langsung ke dalam barang yang akan diproduksi dan kemudian dijual. IAI (PSAK 14), menyatakan persediaan sebagai aset yang (paragraf 7) sebagai berikut:

1. Dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
2. Dalam proses produksi untuk dijual

3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa

#### **2.1.5.2 Fungsi Persediaan**

Menurut Eddy Herjanto (2008:239) Beberapa fungsi penting yang dikandung oleh persediaan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan, sebagai berikut :

- a. Menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan
- b. Menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan
- c. Menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi
- d. Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran
- e. Mendapat keuntungan dari pembelian berdasarkan diskon kuantitas
- f. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang yang diperlukan

#### **2.1.5.3 Biaya – Biaya Dalam Persediaan**

Menurut Eddy Herjanto (2008:256) Unsur – unsur biaya yang terdapat dalam persediaan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan persediaan.

1. Biaya pemesanan  
Biaya pemesanan (*ordering costs, procurement costs*) adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan/barang, sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Biaya pemesanan ini meliputi semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengadakan pemesanan barang, yang dapat mencakup biaya administrasi dan penempatan order, biaya pemilihan vendor/pemasok, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya penerimaan dan pemeriksaan barang.

2. Biaya penyimpanan  
Biaya penyimpanan (*carrying costs, holding costs*) adalah biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. Yang termasuk biaya ini, antara lain biaya sewa gudang, biaya administrasi pergudangan, gaji pelaksana pergudangan, biaya listrik, biaya modal yang tertanam dalam persediaan, biaya asuransi ataupun biaya kerusakan, kehilangan atau penyusutan barang selama dalam penyimpanan
3. Biaya kekurangan persediaan  
Biaya kekurangan persediaan (*shortage cost, stockout costs*) adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. biaya kekurangan persediaan ini pada dasarnya bukan biaya nyata (*riil*), melainkan berupa biaya kehilangan kesempatan. Dalam perusahaan manufaktur biaya ini merupakan biaya kesempatan yang timbul misalnya karena terhentinya proses produksi sebagai akibat tidak adanya bahan yang diproses, yang antara lain meliputi biaya kehilangan waktu produksi bagi mesin dan karyawan.

#### **2.1.5.4 Metode Penilaian Persediaan**

Menurut Sigit (2013:62) penilaian persediaan bertujuan untuk mengetahui nilai persediaan yang dipakai/dijual atau persediaan yang tersisa dalam suatu periode.terdapat tiga metode yang digunakan dalam menilai persediaan, yaitu *first in first out (FIFO)*, *last in first out (LIFO)*, dan rata rata tertimbang.

1. *Metode first in first out (FIFO)*  
Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa harga barang persediaan yang sudah terjual atau terpakai terpakai dinilai menurut harga pembelian barang yang terdahulu masuk. Dengan demikian, persediaan akhir dinilai menurut harga pembelian barang yang terakhir masuk.
2. *Metode last in first out*  
Berbeda dengan *fifo*, metode ini mengasumsikan bahwa nilai barang yang terjual/terpakai dihitung berdasarkan harga pembelian barang yang terakhir masuk, dan nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan harga pembelian yang terdahulu masuk.
3. *Metode rata rata tertimbang*  
Nilai persediaan pada metode ini didasarkan atas harga rata rata barang yang dibeli dalam suatu periode tertentu.

### 2.1.5.5 Metode Pencatatan Persediaan

Sistem pencatatan persediaan yang lazim digunakan terdiri dari sistem fisik/periodik (*physical/periodic inventory system*) dan sistem *perpetual* (*continual inventory system*). Kieso (2011:404) membedakan kedua sistem ini sebagai berikut:

- a. sistem persediaan perpetual secara terus menerus melacak perubahan akun persediaan. Yaitu, semua pembelian dan penjualan (pengeluaran) barang dicatat secara langsung ke akun persediaan pada saat terjadi.
- b. Sistem persediaan periodik, kuantitas persediaan ditangan ditentukan, seperti yang tersirat oleh namanya, secara periodik. Semua pembelian persediaan selama periode akuntansi dicatat dengan mendebet akun pembelian. Total akun pembelian pada akhir periode akuntansi ditambahkan ke biaya persediaan ditangan pada awal periode untuk menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode berjalan.

### 2.1.5.6 Sistem Pengendalian Persediaan

Menurut Agus Sartono dalam (2010:453), beberapa sistem pengendalian manajemen adalah sebagai berikut:

1. sistem komputerisasi  
banyak perusahaan besar memanfaatkan komputer dalam manajemen persediaan. Dengan komputerisasi, dimungkinkan pencatatan persediaan, pengurangan dan pengolahan data persediaan dilakukan dengan sangat cepat. Selain itu komputer dapat menyediakan data kapan harus dilakukan pemesanan kembali
2. sistem just in time  
metode just in time sebenarnya telah dikembangkan oleh Jepang dan menjadi begitu populer di seluruh dunia. Pada prinsipnya, metode ini hanya mensinkronkan kecepatan bagian produksi dengan bagian pengiriman.
3. sistem pengendalian ABC  
metode economical order quantity hanya menentukan jumlah pemesanan yang optimal. Tetapi metode ini mengasumsikan bahwa pemakaian persediaan relatif konstan



4. material requirement planning(MRP)  
MRP pada hakikatnya merupakan sistem informasi yang berbasis komputer untuk penjadwalan produksi dan pembelian item produksi yang bersifat dependen demand.
5. Out-sourcing  
Alternatif lain dalam pengendalian persediaan ini adalah dengan cara membeli dari pihak luar. Dengan cara ini maka perusahaan tidak perlu harus memproduksi sendiri input yang diperlukan dalam proses produksi.

#### 2.1.5.7 Jenis Jenis Persediaan

Menurut Eddy Herjanto (2008:239) persediaan dapat dikelompokkan kedalam empat jenis, yaitu:

1. *Fluctuation stock*, merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan untuk mengatasi bila terjadi kesalahan/penyimpangan dalam prakiraan penjualan, waktu produksi, atau pengiriman barang.
2. *Anticipation stock*, merupakan persediaan untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan, misalnya pada musim permintaan tinggi, tetapi kapasitas produksi pada saat itu tidak mampu memenuhi permintaan. Persediaan ini juga dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan sukarnya diperoleh bahan baku sehingga tidak mengakibatkan terhentinya produksi.
3. *Lot-size inventory*, merupakan persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan pada saat itu. Persediaan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari harga barang (berupa diskon) karena membeli dalam jumlah yang besar, atau untuk mendapatkan penghematan dari biaya pengangkutan per unit yang lebih rendah
4. *Pipeline inventory*, merupakan persediaan yang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat dimana barang itu akan digunakan. Misalnya, barang yang dikirim dari pabrik menuju tempat penjualan, yang dapat memakan waktu beberapa hari atau minggu

### 2.1.5.8 Fraud Atas Persediaan

Menurut Diaz (2013:19) yang dimaksud dengan fraud atas persediaan dan aset lainnya adalah penyalahgunaan segala bentuk aset yang dimiliki oleh perusahaan/organisasi selain berbentuk kas. Bentuk bentuk fraud persediaan dan aset lainnya meliputi :

- a. pencurian persediaan ( inventory larceny scheme)
- b. skema permintaan dan pemindahan aset (asset requisition and transfer scheme)
- c. false billing and purchasing &receiving scheme
- d. skema pemalsuan pengiriman ( false shipping scheme)

Menurut Karyono (2013:20) kecurangan persediaan dan aset lainnya terdiri dari pencurian (larceny) dan penyalahgunaan (misuse) larceny schame dimaksudkan sebagai pengambilan persediaan/barang di gudang karena penjualan atau pemakaian, untuk perusahaan, tanpa ada upaya untuk menutupi pengambilan tersebut dalam akuntansi atau catatan gudang

### 2.1.5.9 Pencegahan Fraud Persediaan

Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegahnya daripada mengobatinya, para ahli memperkirakan bahwa fraud yang terungkap merupakan sebagian kecil dari seluruh fraud yang sebenarnya terjadi. oleh karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya . ada ungkapan yang secara mudah ingin menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari fraud, ungkapan itu adalah *fraud by need, by greed, and by opportunity*. ada yang bermakna dari ungkapan itu, kalau kita ingin mencegah fraud, hilangkanlah atau tekan sedapat mungkin (berdasarkan *cost benefit analisis*). menghilangkan atau menekan need

and greed yang mengawali terjadinya fraud. unsur *by opportunity* dalam ungkapan diatas biasanya ditekan melalui pengendalian intern (Tuannakota 2010:271)

COSO (dalam Amrizal, 2004) mengemukakan pengertian pencegahan kecurangan sebagai berikut:

‘Pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan’.

Tuanakotta (2010:162) mengemukakan bahwa: “Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal”.

Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Ia seperti pagar-pagar yang menghalangi pencuri masuk kehalaman rumah orang. Seperti pagar, bagaimanapun kokohnya tetap dapat ditembus oleh pelaku *fraud* yang cerdik dan mempunyai nyali untuk melakukannya.

Semua pengendalian dapat digolongkan dalam pengendalian intern aktif dan intern pasif. kata kunci untuk pengendalian intern aktif adalah to prevent, mencegah. kata kunci untuk pengendalian pasif adalah to deter, mencegah karena konsekuensinya terlalu besar, membuat jera.

Sarana pengendalian intern aktif yang sering dipakai dan umumnya sudah dikenal dalam sistem akuntansi, meliputi :

1. tanda tangan
2. tanda tangan kaunter
3. password dan PIN
4. pemisahan tugas ,
5. pengendalian aset fisik .

6. pengendalian persediaan secara real time
7. pagar, gembok, dan semua bangunan dan penghalang fisik
8. pencocokan dokumen
9. formulir yang sudah dicetak nomornya

Beberapa bentuk pengendalian intern pasif meliputi : pengendalian yang khas untuk masalah yang dihadapi (customized controls), jejak audit (audit trails), audit yaang fokus (focused audits), "pengintaian" atas kegiatan kunci (surveillance of key activities) dan pemindahan tugas (rotation of key personnel )

Karyono (2013:61) mengemukakan bahwa mencegah *fraud* dapat dilakukan dengan berbagai cara dari berbagai sisi, yaitu:

### **1. Mencegah *Fraud* Menurut Teori *Triangle Fraud***

- a. Mengurangi “Tekanan” Sitisional yang Menimbulkan Kecurangan
- b. Mengurangi “Kesempatan” Melakukan Kecurangan
- c. Mengurangi “Pembenaran” Melakukan Kecurangan dengan  
Memperkuat Integritas Pribadi Pegawai

Adapun penjelasan cara mencegah *fraud* menurut teori *triangle fraud* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi tekanan yang menimbulkan kecurangan antara lain dengan menghindari tekanan eksternal yang mungkin menggoda pegawai akunting untuk menyusun laporan keuangan yang menyesatkan dan menetapkan prosedur akuntansi yang jelas dan seragam.
2. Mengurangi kesempatan melakukan kecurangan antara lain dengan peningkatan pengendalian baik dalam rancangan struktur pengendalian maupun dalam pelaksanaannya, memantau secara hati-hati transaksi bisnis dan hubungan pribadi pemasok pembeli, melakukan pemisahan fungsi di antara pegawai sehingga ada pemisahan otorisasi penyimpanan dan pencatatan, serta penetapan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku *fraud*.

3. Mengurangi pembenaran melakukan kecurangan salah satunya dengan adanya contoh perilaku jujur dari para manajer dan berperilaku seperti apa yang mereka inginkan.

## 2. Mencegah *Fraud* Menurut *Gone Theory*

Langkah-langkah untuk meminimalisirnya antara lain:

- a. Keserakahan (*Greeds*)
- b. Kesempatan (*Opportunities*)
- c. Kebutuhan (*Needs*)
- d. Pengungkapan (*Exposure*)

Adapun penjelasan dari mencegah *fraud* menurut *gone theory* tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Keserakahan

Keserakahan berkaitan dengan moral dan perilaku serakah yang secara potensial ada pada setiap orang. Untuk mencegah agar keserakahan tersebut dapat diminimalisir salah satunya dengan mendorong pelaksanaan umat menjalankan ibadah agama secara benar.

### 2. Kesempatan

Kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi yang kondisi pengendaliannya lemah sehingga terbuka peluang terjadinya kecurangan. Untuk mencegahnya salah satunya dengan peningkatan kualitas pengendalian internal pada setiap unit organisasi.

### 3. Kebutuhan

Kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupan yang layak. Untuk mengatasinya salah satunya dengan perbaikan pendapatan gaji yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerjanya.

### 4. Pengungkapan

Pengungkapan dimaksud berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi hukum bagi pelaku kecurangan. Agar tercipta konsekuensi hukum yang tegas, salah satunya perlu dilakukan pelaksana sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kecurangan.

### 3. Mencegah *Fraud* Dengan Menerapkan Prinsip Dasar dalam *Good*

#### *Corporate Governance (GCG)*

- a. Prinsip Transparasi
- b. Prinsip Akuntabilitas
- c. Prinsip Kewajaran
- d. Prinsip Integritas
- e. Prinsip Partisipasi

Adapun penjelasan dari mencegah *fraud* dengan menerapkan prinsip dasar dalam GCG adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Transparasi, antara lain menganut sistem keterbukaan yaitu tidak boleh menyembunyikan transaksi dan informasi, ada kewajiban untuk mengungkap transaksi material dan keterbukaan dalam kepastian hukum.
2. Prinsip Akuntabilitas, antara lain tanggung jawab yang jelas, ada kewajiban untuk melaporkan wewenang dan tanggung jawab serta dikendalikan, diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
3. Prinsip Kewajaran, antara lain tidak diskriminatif sehingga tidak ada kelompok yang dirugikan, diatur sanksi hukum dan bila ada yang melanggar dikenakan sanksi tanpa pandang bulu, serta ada perlindungan terhadap pihak-pihak yang mengalami kerugian.
4. Prinsip Integritas, antara lain kualitas karakter pribadi pegawai pada suatu kegiatan harus kompeten, jujur, dan *ada law enforcement*.
5. Prinsip Partisipasi, antara lain ada sistem rekrutmen dan pengembangan SDM, dan ditetapkan budaya perusahaan dan ada media kontrol masyarakat.

Untuk membantu manajemen dan dewan direksi dalam upaya memerangi kecurangan yang dikutip oleh Arens et al (2013:441) AICPA, bersama dengan beberapa organisasi profesional, menerbitkan manajemen antifraud program and control: guidance to help prevent, deter, and detect fraud (program dan pengendalian antikecurangan: pedoman untuk membantu mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan)pedoman ini mengidentifikasi tiga unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan:

1. Budaya jujur dan etika yang tinggi
2. Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan
3. Pengawasan oleh komite audit

Menurut fariz fernazy yang dikutip di [://www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

Pencegahan Dalam kasus pencurian aset sediaan adapun cara-cara pencegahan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan membangun suatu pengendalian internal yang memadai. Cara pencegahan pencurian aset sediaan, antara lain:

1. Ada pencatatan terhadap keluar masuknya persediaan.
2. Penyimpanan persediaan dan penggunaan gudang atau ruang yang terkunci dengan akses yang terbatas pada orang-orang yang diberi otorisasi saja merupakan hal yang penting dalam melindungi aset dan untuk meminimalkan terjadinya pencurian.
3. Dilakukan perhitungan persediaan dan pengecekan jumlah barang secara periodik yang independen, pembandingannya dengan catatan tentang jumlah dan kepemilikan.
4. Komputer mengecek kesesuaian antara catatan tambahan dan akun-akun pengendali karena nilai yang tercatat persediaan dalam buku besar pembantu atau file induk mungkin tidak sesuai dengan akun-akun pengendali (untuk menjaga kebenaran saldo persediaan)
5. Diadakannya Inspeksi kondisi persediaan secara periodik, laporan aktivitas persediaan periodik untuk menelaah kinerja manajemen.
6. Proteksi terhadap barang dalam proses dapat dilakukan dengan mengawasi daerah produksi oleh petugas keamanan perusahaan, pemberian label pada barang dan penggunaan tiket perpindahan bernomor urut untuk mengendalikan perpindahan barang dalam proses di sekitar perusahaan.

Dalam pencegahan fraud persediaan, Badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP) pada tahun 2002 mengeluarkan upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi pada pengelolaan BUMN/BUMD dan perbankan. BPKP mengeluarkan upaya pencegahan fraud siklus persediaan berdasarkan jenis jenis penyimpangan persediaan, yaitu :

4. Kekurangan persediaan barang akibat pencurian/penggelapan yang dilakukan oleh oknum petugas gudang ditutupi dengan membuat transaksi penjualan kredit fiktif.

Upaya preventif :

- a. Direksi harus menetapkan prosedur penerimaan dan pengeluaran barang yang memisahkan fungsi penerimaan barang dengan penyimpanan barang
  - b. Direksi harus menetapkan persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penjualan kredit
  - c. Opname persediaan (stock opname) harus dilakukan secara periodik dan/ sewaktu waktu
  - d. Pencatatan persediaan barang harus diselenggarakan dengan membuat kartu gudang pada masing masing barang persediaan.
5. Pembelian persediaan fiktif dengan cara mencatat penerimaan persediaan bekas pakai namun kondisinya masih baik sebagai penerimaan pengadaan persediaan baru.

Upaya preventif :

- a. Direksi harus menetapkan pemisahan antara fungsi permintaan barang, pembelian, penerimaan dan pembayaran, dipisahkan dengan fungsi penyimpanan
- b. Direksi harus menetapkan persediaan berdasarkan analisa kebutuhan
- c. Direksi harus mewajibkan penetapan spesifikasi persediaan yang dapat dibeli bila kebutuhan pemakai tidak terdapat digudang



- d. Direksi harus menetapkan bahwa setiap penerimaan fisik barang di gudang harus dibandingkan dengan surat jalan dan dibuat berita acara penerimaan barang
  - e. Setiap pencatatan utang dari penerimaan persediaan dibuat berdasarkan surat permintaan pembelian, surat pesanan, dan bukti penerimaan barang serta faktur dan packing slip
  - f. Persediaan barang bekas pakai harus dicatat dan disimpan terpisah dari barang baru
6. Penjualan persediaan oleh oknum karyawan bagian persediaan yang dipertanggungjawabkan sebagai susut gudang
- Upaya preventif :
- a. Direksi harus menetapkan prosedur pemasukan dan pengeluaran persediaan ke gudang serta jenis persediaan yang diperbolehkan diperhitungkan sebagai susut serta koefisien penyusutannya
  - b. Direksi harus menetapkan pedoman pengelolaan persediaan di gudang dan pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap persediaan di gudang
  - c. Laporan penerimaan persediaan, laporan pengeluaran persediaan dan laporan persediaan harus ditandatangani pejabat yang berwenang
7. Oknum petugas gudang membuat bukti pengeluaran barang gudang palsu untuk menutupi ketekoran persediaan karena penjualan yang dilakukannya
- a. Direksi harus menempatkan petugas-petugas untuk melaksanakan stock opname persediaan secara periodik dan meneliti selisih yang

- terjadi dengan catatan dan rekonsiliasi antara administrasi persediaan kantor dengan administrasi persediaan gudang maupun buku besar persediaan
- b. Direksi harus membuat ketentuan yang melarang petugas gudang mengeluarkan barang tanpa bon permintaan barang yang telah disetujui pejabat yang berwenang.
8. Penjualan/penggelapan persediaan oleh oknum petugas gudang dengan cara menitipkannya pada truk petugas pengiriman kemudian mengambilnya diluar lokasi perusahaan
- a. Direksi harus menugaskan secara periodik beberapa petugas untuk melaksanakan stock opname dan meneliti perbedaan fisik dengan catatan gudang
  - b. Setiap orang dan kendaraan yang masuk dan keluar kawasan gudang harus diawasi dengan membuat satu akses keluar/masuk kawasan dijaga satpam, setiap kendaraan/orang yang akan masuk harus melapor lebih dahulu pada satpam
  - c. Petugas gudang dilarang melayani pengambilan barang bagi pihak dan kendaraan yang tidak memiliki/memegang pas masuk
  - d. Petugas gudang harus membuat bukti pengeluaran barang gudang atas setiap pengambilan barang
  - e. Pada saat keluar di pintu gerbang, satpam harus meminta pas masuk dari orang/kendaraan yang akan keluar masuk; mengecek fisik

barang yang dibawa, mencocokkan fisik barang dengan bukti pengeluaran barang gudang dan surat jalan

Menurut Karyono (2013:72) Pencegahan fraud menurut jenis fraud pada dasarnya ialah menutup peluang kemungkinan terjadinya fraud. Untuk itu ditingkatkan pengendalian pada aktivitas/kegiatan yang dapat memberi peluang atau mendorong terjadinya fraud, baik melalui pengendalian organisasi dan operasi maupun pengendalian langsung. pencegahan fraud persediaan antara lain:

- a. Inventarisasi oleh petugas independen secara mendadak dan rutin untuk mengurangi niat kecurangan karena cepat ketahuan dengan adanya inventarisasi mendadak
- b. Pemisahan antara otorisasi, penyimpanan, dan pencatat agar terjadi saling kontrol ketiga fungsi itu
- c. Dokumen penerimaan pracetak (prenumbered) sehingga sulit terjadi penyalahgunaan dokumen
- d. Pengamanan fisik terhadap persediaan berupa tempat penyimpanan (kunci, satpam) dibatasi aksesnya dan dapat juga dengan menggunakan elektronik (kamera) dan sebagainya, sehingga pelaku kecurangan sulit aksesnya ke persediaan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut ini

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama dan tahun penelitian	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil penelitian
1.	Umi Hasanah (2014)	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> persediaan Pada Cv dwi Warna Abadi	Pengendalian internal sebagai variabel bebas ( <i>independent variabel</i> ). Pencegahan fraud persediaan sebagai variabel terikat ( <i>dependent variabel</i> )	Hasil variabel independen berupa pengendalian internal secara parsial dapat berpengaruh terhadap pencegahan fraud persediaan, hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal sebagai variabel bebas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencegahan fraud persediaan sebagai variabel terikat
2.	Nety Arum Sari (2014)	Pengaruh pengendalian Internal terhadap pencegahan <i>Fraud</i> persediaan pada Pt Andalan Chrisdeco	Pengendalian internal sebagai variabel bebas ( <i>independent variabel</i> ). Pencegahan kecurangan persediaan sebagai variabel terikat ( <i>dependent variabel</i> )	Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen berupa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> persediaan

No	Nama dan tahun penelitian	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil penelitian
3.	Desy Kristianingsih (2013)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan persediaan barang dagang.	Pengendalian internal sebagai variabel bebas ( <i>independent variabel</i> ). Pencegahan kecurangan persediaan sebagai variabel terikat ( <i>dependent variabel</i> )	Hasil dari penelitian ini adalah H0 ditolak dan H1 diterima sehingga terdapat pengaruh signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap Kecurangan persediaan barang dagang.
4.	Desi Nur Hakim (2015)	Pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan ( <i>fraud</i> )	Profesionalisme auditor sebagai variabel bebas ( <i>independent variabel</i> ) pencegahan dan pendeteksian kecurangan sebagai variabel terikat ( <i>dependen variabel</i> )	Dapat diketahui bahwa profesionalisme auditor internal berhubungan positif dan signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan ( <i>fraud</i> ).
5.	Debora Manataliana (2011)	Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Audit Internal terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan pada Persediaan: Studi Kasus pada PT Inti (Persero)Bandung	Pelaksanaan fungsi audit internal sebagai variabel bebas ( <i>independen variabel</i> ) pencegahan kecurangan oada persediaan sebagai variabel terikat	Adanya Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Pada Persediaan

No	Nama dan tahun penelitian	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil penelitian
	Helena wongkar (2013)	Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pencegahan Kecurangan pada Bagian Penjualan di PT. Asianagro Agung Jaya.	Profesionalisme auditor internal sebagai variabel bebas (independen variabel) pencegahan kecurangan pada bagian penjualan sebagai variabel terikat	Hasil penelitian ini adalah profesionalisme auditor internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada bagian penjualan di PT. Asianagro Agung Jaya yaitu sebesar 68,1%
6.	<b>YENI SISWATI (2012)</b>	Profesionalisme auditor internal dan perannya dalam Pengungkapan temuan audit	Profesionalisme auditor internal	Auditor internal yang profesional merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitasnya sehingga penyimpangan yang ada tersebut dalam diungkapkan dalam temuan audit.

### 2.3 Kerangka pemikiran

Persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan. Kesalahan investasi persediaan ini akan mengganggu kelancaran kemungkinannya mengalami penundaan, atau perusahaan beroperasi pada kapasitas yang rendah. Sebaliknya apabila persediaan terlalu besar maka akan mengakibatkan perputaran persediaan yang rendah sehingga profitabilitas perusahaan menurun.

Persediaan dalam laporan keuangan baik neraca dan laporan laba rugi sangat diperhitungkan, persediaan dilaporan laba rugi sangat menentukan dalam kaitannya dengan penentuan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode. Kesalahan dalam perhitungan persediaan akan mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi. Misalnya kesalahan dalam perhitungan fisik persediaan akan mengakibatkan kesalahan dalam persediaan akhir, aktiva lancar, dan total aktiva pada neraca. Selain itu kesalahan dalam perhitungan fisik persediaan akan menimbulkan kekeliruan harga pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih pada laporan laba rugi.

Persediaan di gudang harus diperhatikan dengan baik karena memang sering terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pencurian oleh karyawan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan, bahkan hampir di sebagian besar perusahaan terjadi kecurangan pada persediaan yang dilakukan oleh karyawan.

Definisi fraud menurut Karyono (2013:1), yaitu: “*fraud* adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya”.

Salah satu contoh sikap perusahaan untuk pencegahan fraud persediaan adalah dengan cara memberikan akses terbatas kepada karyawan, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat masuk dalam gudang perusahaan.

Menurut The committee of sponsoring organizations (COSO) yang dikutip dalam YPIA (2008:17) merumuskan pengendalian internal sebagai :

“sebuah proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberi jaminan

yang wajar atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan yang dimaksud, secara umum meliputi, operasi yang efisien dan efektif, pelaporan yang handal, dan ketaatan pelaksanaan kegiatan organisasi terhadap semua kebijakan dan regulasi yang berlaku”

Salah satu solusi dalam mencegah fraud pencegahan persediaan adalah dengan adanya pengendalian internal yang baik. Kaitannya antara pengendalian internal dengan pencegahan fraud sangat erat, jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dapat diperkecil. Kalaupun kesalahan dan kecurangan masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin.

Kaitannya antara pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* persediaan sangat erat. Hery (2009:301) mengemukakan bahwa :

“Pengendalian internal atas persediaan mutlak diperlukan mengingat aktiva ini tergolong cukup lancar. Kalau kita berbicara mengenai pengendalian internal atas persediaan, sesungguhnya ada dua tujuan utama dari diterapkannya pengendalian internal tersebut, yaitu untuk mengamankan atau mencegah aktiva perusahaan (persediaan) dari tindakan pencurian, penyelewengan, penyalahgunaan, dan kerusakan, serta menjamin keakuratan (ketepatan) penyajian dalam laporan keuangan”

Pengendalian internal yang efektif dapat membantu perusahaan mengarahkan kegiatan operasi mereka dan mencegah pencurian serta tindakan penyalahgunaan lainnya (james, 2009:388). Sistem pengendalian intern merupakan salah satu alat pengendalian atau alat pengamanan bagi manajemen untuk meningkatkan keamanan persediaan barang dan untuk mencegah kecurangan yang mungkin terjadi di dalam gudang. Karena persediaan barang



merupakan salah satu aktiva yang sangat mudah diselewengkan atau digelapkan yang dapat merugikan perusahaan dan mengganggu kelangsungan hidup perusahaan.

Arens (2013:436) mengemukakan bahwa :

“Pengendalian internal yang lemah menciptakan kesempatan untuk mencuri. Apabila pegawai menangani penyimpanan atau bahkan akses sementara ke aktiva sekaligus memegang catatan akuntansi untuk aktiva itu, timbulah potensi kerugian. Jika pegawai gudang persediaan juga memegang catatan persediaan, mereka dengan mudah dapat mengambil item item persediaan dan menutupi pencurian itu dengan menyesuaikan dengan caatatan akuntansi”

Selain pengendalian internal yang diterapkan sebagai salah satu solusi dalam mencegah terjadinya fraud adalah peran para auditor internal, juga berperan penting dalam mencegah fraud persediaan, seperti yang diungkapkan oleh Hiro Tugiman (2006:48) :

“Pemeriksa internal harus harus meninjau berbagai alat atau cara yang dapat digunakan untuk melindungi harta terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang ilegal, atau tidak pantas”

Auditor internal yang profesional harus dapat mencegah terjadinya fraud seperti yang diungkapkan oleh Hery ( 2013:80), yaitu:

“Auditor internal harus menjadi lebih terlatih daripada sebelumnya baik dari segi keterampilan, keahlian maupun pengetahuan. Dengan semakin profesional, auditor internal diharapkan akan menjadi lebih ahli dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud”

Profesi auditor internal memiliki kode etik profesi yang harus ditaati dan dijalankan oleh segenap auditor internal. Kode etik tersebut memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Prinsip-prinsip perilaku

profesional memberikan pedoman bagi anggota dalam kinerja tanggung jawab profesionalnya dan menyatakan tentang prinsip-prinsip dasar etika dan perilaku profesional. Prinsip-prinsip tersebut menghendaki komitmen teguh kepada perilaku yang terhormat, meskipun mengorbankan keuntungan pribadi (Messier, Steven, dan Douglas, 2006:514). Untuk meningkatkan kualitas peran auditor internal dalam mengungkapkan temuan audit dan mencegah kecurangan, diperlukan profesionalisme yaitu kemampuan individu dalam melaksanakan tugas auditor internal yang terkait dengan kegiatan perusahaan secara profesional.

Dengan adanya pengendalian internal yang baik dan profesionalisme para auditor internal pada perusahaan, diharapkan dapat memperkecil terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh para pelaku kecurangan.

### **2.3.1 Hubungan Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Persediaan**

Hubungan antara pengendalian internal dengan masalah kecurangan dalam suatu perusahaan sangat berkaitan. Dengan adanya pengendalian internal dalam sebuah perusahaan dipercaya dapat bermanfaat dalam hal membantu perusahaan dalam mencegah terjadinya *fraud*. Walaupun pengendalian internal merupakan pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan, namun pengendalian internal tidak bertanggung jawab atas terjadinya *fraud*.

Menurut The committee of sponsoring organizations (COSO) yang dikutip dalam YPIA (2008:17) merumuskan pengendalian internal sebagai :

“sebuah proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberi jaminan

yang wajar atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan yang dimaksud, secara umum meliputi, operasi yang efisien dan efektif, pelaporan yang handal, dan ketaatan pelaksanaan kegiatan organisasi terhadap semua kebijakan dan regulasi yang berlaku”

Maka pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditunjukkan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Kaitannya antara pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* persediaan sangat erat. Hery (2009:301) mengemukakan bahwa :

“Pengendalian internal atas persediaan mutlak diperlukan mengingat aktiva ini tergolong cukup lancar. Kalau kita berbicara mengenai pengendalian internal atas persediaan, sesungguhnya ada dua tujuan utama dari diterapkannya pengendalian internal tersebut, yaitu untuk mengamankan atau mencegah aktiva perusahaan (persediaan) dari tindakan pencurian, penyelewengan, penyalahgunaan, dan kerusakan, serta menjamin keakuratan (ketepatan) penyajian dalam laporan keuangan”

Pengendalian internal yang efektif dapat membantu perusahaan mengarahkan kegiatan operasi mereka dan mencegah pencurian serta tindakan penyalahgunaan lainnya (James, 2009:388). Sistem pengendalian intern merupakan salah satu alat pengendalian atau alat pengamanan bagi manajemen untuk meningkatkan keamanan persediaan barang dan untuk mencegah kecurangan yang mungkin terjadi di dalam gudang. Karena persediaan barang merupakan salah satu aktiva yang sangat mudah diselewengkan atau digelapkan yang dapat merugikan perusahaan dan mengganggu kelangsungan hidup perusahaan.

Arens (2013:436) mengemukakan bahwa :

“Pengendalian internal yang lemah menciptakan kesempatan untuk mencuri. Apabila pegawai menangani penyimpanan atau bahkan akses sementara ke aktiva sekaligus memegang catatan akuntansi untuk aktiva itu, timbulah potensi kerugian. Jika pegawai gudang persediaan juga memegang catatan persediaan, mereka dengan mudah dapat mengambil item item persediaan dan menutupi pencurian itu dengan menyesuaikan dengan caatatan akuntansi”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat kecurangan yang terjadi itu disebabkan oleh pengendalian internal yang tidak memadai. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan, dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya *fraud* dapat diperkecil. Dengan diterapkannya pengendalian internal pada perusahaan profit maupun non profit dapat melindungi aset perusahaan dari *fraud* dan tentunya membantu manajemen dalam melaksanakan segala aktivitasnya.

Umi Hasanah (2014), Nety (2014), Desy (2013) telah melakukan pengujian mengenai pengaruh dari pengendalian internal terhadap pencegahan fraud persediaan. Hasil pengujian mereka menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud persediaan

### **2.3.2 Hubungan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud Persediaan**

Memastikan seluruh kegiatan perusahaan telah berjalan efektif dan efisien memang merupakan tugas dari auditor internal. Namun tak cukup sampai disitu, auditor internal pun mempunyai kewajiban untuk membantu manajemen untuk mencegah dan mendeteksi tindakan *fraud*. Disisi lain, auditor internal yang mempunyai sikap profesional dinilai selalu melaksanakan tugas – tugasnya dengan baik, Auditor Internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian *fraud* yang terjadi di suatu organisasi (perusahaan)

Menurut Hiro Tugiman (2006:48) mengemukakan bahwa :

“Pemeriksa internal harus harus meninjau berbagai alat atau cara yang dapat digunakan untuk melindungi harta terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang ilegal, atau tidak pantas”

Auditor internal yang profesional harus dapat mencegah terjadinya fraud seperti yang diungkapkan oleh Hery ( 2013:80), yaitu:

“Auditor internal harus menjadi lebih terlatih daripada sebelumnya baik dari segi keterampilan, keahlian maupun pengetahuan. Dengan semakin profesional, auditor internal diharapkan akan menjadi lebih ahli dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud.”

Profesi auditor internal memiliki kode etik profesi yang harus ditaati dan dijalankan oleh segenap auditor internal. Kode etik tersebut memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Prinsip-prinsip perilaku profesional memberikan pedoman bagi anggota dalam kinerja tanggung jawab

profesionalnya dan menyatakan tentang prinsip-prinsip dasar etika dan perilaku profesional. Prinsip-prinsip tersebut menghendaki komitmen teguh kepada perilaku yang terhormat, meskipun mengorbankan keuntungan pribadi (Messier, Steven, dan Douglas, 2006:514).

Untuk meningkatkan kualitas peran auditor internal dalam mengungkapkan temuan audit dan mencegah kecurangan, diperlukan profesionalisme yaitu kemampuan individu dalam melaksanakan tugas auditor internal yang terkait dengan kegiatan perusahaan secara profesional.

Hasil penelitian Desy (2015), Helena (2013), Debora (2011), Yeni (2012) menunjukkan bahwa profesionalisme auditor internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud persediaan.

### **2.3.3 Hubungan pengaruh Pengendalian Internal dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud Persediaan**

Persediaan barang merupakan aktiva yang penting bagi perusahaan dan memiliki kontribusi terhadap kelancaran operasi perusahaan. Persediaan di gudang harus diperhatikan dengan baik karena memang sering terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pencurian oleh karyawan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan, bahkan hampir di sebagian besar perusahaan terjadi kecurangan pada persediaan yang dilakukan oleh karyawan. Dan pengendalian internal adalah salah satu solusi dalam mencegah fraud persediaan. Dengan adanya pengendalian internal dalam sebuah perusahaan dipercaya dapat bermanfaat dalam hal membantu perusahaan dalam mencegah terjadinya *fraud*.

Walaupun pengendalian internal merupakan pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan, namun pengendalian internal tidak bertanggung jawab atas terjadinya *fraud*.

Menurut The committee of sponsoring organizations (COSO) yang dikutip dalam YPIA (2008:17) merumuskan pengendalian internal sebagai :

“sebuah proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberi jaminan yang wajar atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan yang dimaksud, secara umum meliputi, operasi yang efisien dan efektif, pelaporan yang handal, dan ketaatan pelaksanaan kegiatan organisasi terhadap semua kebijakan dan regulasi yang berlaku”

Kaitannya antara pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* persediaan sangat erat. Hery (2009:301) mengemukakan bahwa :

“ Pengendalian internal atas persediaan mutlak diperlukan mengingat aktiva ini tergolong cukup lancar. Kalau kita berbicara mengenai pengendalian internal atas persediaan, sesungguhnya ada dua tujuan utama dari diterapkannya pengendalian internal tersebut, yaitu untuk mengamankan atau mencegah aktiva perusahaan (persediaan) dari tindakan pencurian, penyelewengan, penyalahgunaan, dan kerusakan, serta menjamin keakuratan (ketepatan) penyajian dalam laporan keuangan “

Arens (2013:436) mengemukakan bahwa :

Pengendalian internal yang lemah menciptakan kesempatan untuk mencuri. Apabila pegawai menangani penyimpanan atau bahkan akses sementara ke aktiva sekaligus memegang catatan akuntansi untuk aktiva itu, timbulah potensi kerugian. Jika pegawai gudang persediaan juga memegang catatan persediaan, mereka dengan mudah dapat mengambil item item persediaan dan menutupi pencurian itu dengan menyesuaikan dengan caatatan akuntansi

Pengendalian internal dapat menekan terjadinya *fraud* persediaan, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan

kecurangan dapat diperkecil. Kalaupun kesalahan dan kecurangan masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin. Dan tindakan tersebut dilakukan oleh auditor internal. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari auditor internal. Apabila auditor internal perusahaan tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan profesional maka akan mengurangi terjadinya fraud. Auditor internal adalah karyawan perusahaan yang bertugas mengevaluasi secara berkesinambungan efektivitas pengendalian internal perusahaan (Sigit Hermawan, 2013:5).

Menurut Hiro Tugiman (2006:48) mengemukakan bahwa :

“Pemeriksa internal harus harus meninjau berbagai alat atau cara yang dapat digunakan untuk melindungi harta terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang ilegal, atau tidak pantas”

Auditor internal yang profesional harus dapat mencegah terjadinya fraud seperti yang diungkapkan oleh Hery ( 2013:80), yaitu:

“Auditor internal harus menjadi lebih terlatih daripada sebelumnya baik dari segi keterampilan, keahlian maupun pengetahuan. Dengan semakin profesional, auditor internal diharapkan akan menjadi lebih ahli dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud”

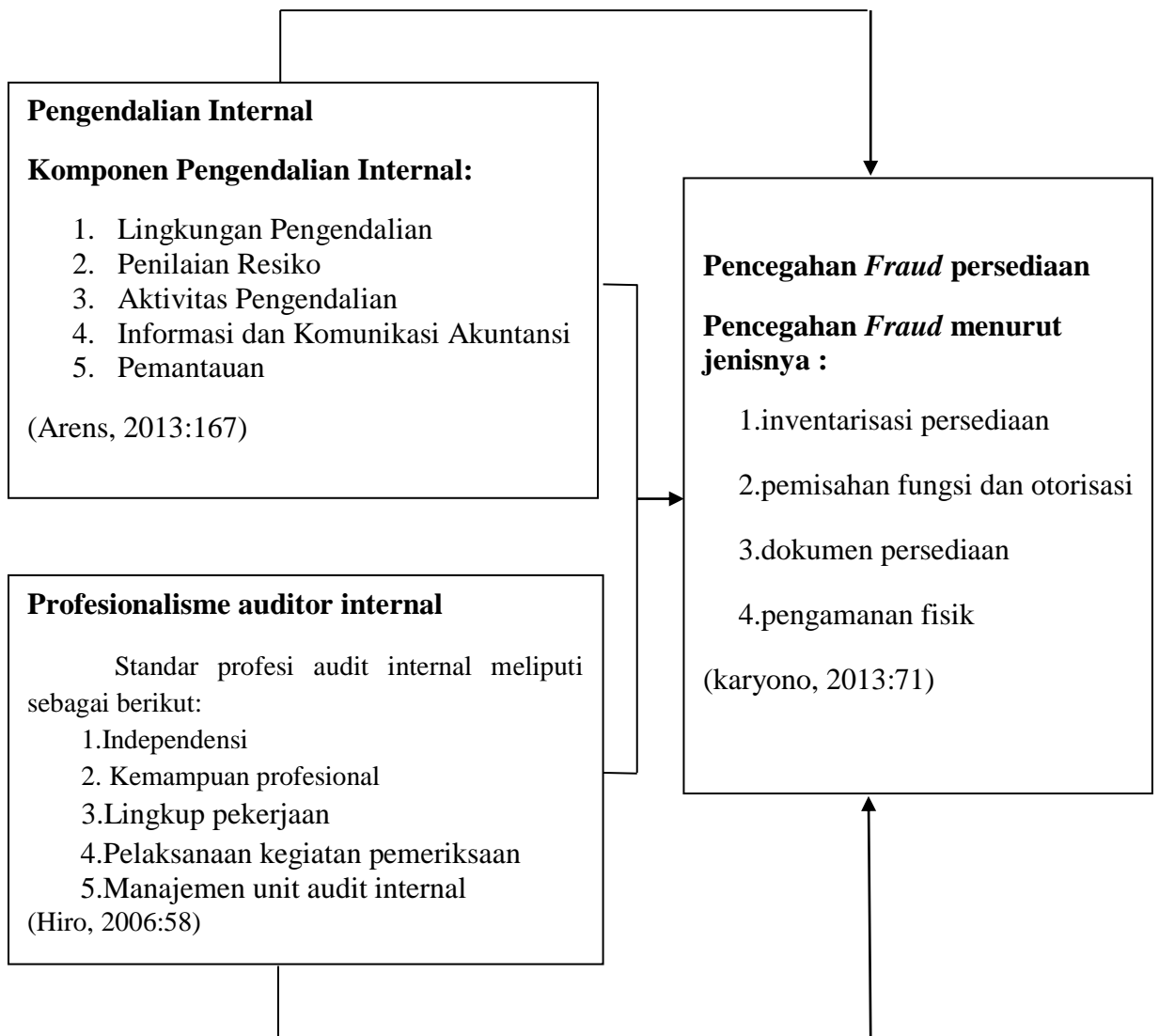
Auditor internal mendukung usaha manajemen untuk menciptakan sebuah budaya kerja yang beretika, jujur, dan berintegritas. auditor internal membantu manajemen dengan mengevaluasi pengendalian internal yang digunakan untuk menemukan atau memperkecil tindakan kecurangan (*fraud*) mengevaluasi risiko *fraud*, dan ikut terlibat dalam melakukan investigasi fraud.



Para pemeriksa internal bertanggung jawab mendukung pencegahan kecurangan, dengan cara menguji dan mengevaluasi kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal, sesuai dengan tingkat kerugian atau risiko yang potensial dalam berbagai segmen kegiatan organisasi (Hiro, 2006:34)

#### **2.4 Paradigma Penelitian**

Berdasarkan uraian teori dan keterkaitan antara variabel pengendalian internal dan profesionalisme auditor internal dengan pencegahan fraud persediaan, maka dapat dirumuskan paradigma pengaruh pengendalian internal dan profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan fraud persediaan, sebagai berikut



**Gambar 2.2 Bagan Paradigma Penelitian**

## 2.5 Hipotesis Penelitian

H1 : Terdapat pengaruh antara pengendalian internal terhadap pencegahan fraud persediaan.

H2 : Terdapat pengaruh antara profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan fraud persediaan.

H3 : Terdapat pengaruh antara pengendalian internal dan profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan fraud persediaan.